

STUDI KASUS

Katingan: Contoh Awal Proyek Karbon Lahan Gambut oleh Sektor Swasta yang Masih Menghadapi Berbagai Tantangan

Gambaran Umum

Lahan gambut merupakan kawasan lahan basah yang terbentuk dari penumpukan sisa-sisa tumbuhan selama ribuan tahun. Lahan ini menyimpan karbon dalam jumlah besar yang dapat dilepaskan ke atmosfer ketika lahan dikeringkan atau hutannya ditebang. Proyek Katingan di Kalimantan Tengah, Indonesia, merupakan salah satu upaya yang dikelola oleh perusahaan swasta untuk melindungi kawasan hutan gambut tersebut.

Perusahaan PT Rimba Makmur Utama berupaya mencegah pengeringan lahan dan penebangan pohon di seluruh kawasan gambut. Perusahaan ini berencana memperoleh pendapatan melalui penjualan "kredit karbon" kepada pembeli yang ingin mengimbangi emisi karbon mereka. Sebagian dari pendapatan tersebut direncanakan untuk dibagikan kepada desa-desa di sekitar kawasan proyek. Proyek Katingan sering disebut sebagai salah satu proyek karbon lahan gambut pertama yang dikelola oleh sektor swasta di Indonesia. Pengalaman proyek ini menunjukkan berbagai potensi manfaat sekaligus tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya.

Apa yang Direncanakan?

- Melindungi hutan gambut dari pengeringan lahan dan penebangan pohon.
- Membagikan sebagian pendapatan dari penjualan kredit karbon kepada desa-desa di sekitar.
- Membantu masyarakat mengembangkan sumber mata pencaharian alternatif.

Apa yang terjadi?

Pelaksanaan proyek ini menunjukkan hasil yang beragam:

- **Proses perizinan yang panjang:** Perusahaan mengajukan permohonan izin untuk menjalankan proyek pada tahun 2008 dan baru memperoleh persetujuan akhir pada tahun 2013. Namun, izin tersebut hanya mencakup sekitar setengah dari luas kawasan yang awalnya diusulkan, sehingga sebagian kawasan gambut lainnya belum termasuk dalam cakupan perlindungan proyek. Hingga tahun 2014, perusahaan masih berupaya memperoleh izin untuk kawasan yang tersisa.
- **Pendapatan yang masih terbatas:** Hingga tahun 2014, proyek ini belum berhasil menjual kredit karbon sehingga masyarakat desa belum menerima manfaat finansial secara langsung. Sementara itu, perusahaan-perusahaan lain di sekitar kawasan, seperti perkebunan kelapa sawit, telah menawarkan peluang pekerjaan kepada masyarakat.
- **Perubahan dalam pemanfaatan hutan:** Sebagian besar keluarga (82–97% responden yang disurvei) menggunakan kayu bakar untuk memasak. Peraturan desa yang baru diperkirakan akan membatasi cara masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya akses terhadap kayu bakar dan sumber daya hutan lainnya yang menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat.
- **Ketidakjelasan pembagian pendapatan:** Proyek ini merencanakan pembagian pendapatan kepada desa-desa melalui perjanjian resmi dan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peraturan pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2014 juga menetapkan bahwa 10% dari hasil penjualan karbon dialokasikan kepada pemerintah.

- **Beragam pandangan masyarakat desa:** Kegiatan pemetaan yang melibatkan masyarakat membantu tercapainya kesepakatan mengenai batas-batas desa. Masyarakat juga menilai positif berbagai kegiatan ekonomi, seperti penjualan rotan dan pembentukan kelompok simpan pinjam perempuan. Sebagian masyarakat berharap proyek segera dilaksanakan, sementara sebagian lainnya masih bersikap hati-hati. Di beberapa desa, perusahaan kelapa sawit juga melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pilihan pemanfaatan lahan.
- **Keterlibatan masyarakat yang masih terbatas pada tahap awal:** Sebelum memperoleh izin, perusahaan belum banyak berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya harapan yang mungkin tidak dapat dipenuhi. Setelah izin diberikan, perusahaan mulai membentuk tim pemadam kebakaran di tingkat lokal pada Maret 2014.

Pertanyaan yang Masih Belum Terjawab

Beberapa hal masih belum memiliki kejelasan, antara lain:

- Apakah perusahaan akan memperoleh izin untuk seluruh kawasan gambut yang direncanakan?
- Bagaimana mekanisme pembagian pendapatan akan dilaksanakan?
- Bagaimana proyek akan membiayai kegiatan operasionalnya apabila pendapatan dari penjualan kredit karbon tidak diperoleh?

Perusahaan menyatakan bahwa proyek tetap dapat berjalan tanpa pendapatan dari penjualan kredit karbon. Namun, perusahaan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana hal tersebut dapat dilakukan.

Catatan

Studi kasus ini bukan merupakan hasil langsung dari proyek penelitian kami, melainkan bersumber dari penelitian yang telah dipublikasikan mengenai proyek lain. Meskipun demikian, studi kasus ini mengangkat berbagai persoalan yang relevan dengan penelitian kami, termasuk perizinan lahan, peraturan pemanfaatan hutan, mekanisme pembagian pendapatan, serta keterlibatan masyarakat.

Sumber

Indriatmoko, Y., Atmadja, S., Utomo, N. A., Ekaputri, A. D., & Komalasari, M. (2014). Katingan peatland restoration and conservation project, Central Kalimantan, Indonesia. In E. O. Sills et al. (Eds.), REDD+ on the ground: A case book of subnational initiatives across the globe (pp. 237–252). CIFOR.